

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah suatu negara agraris dan tergolong negara sedang berkembang. Umumnya, suatu negara agraris, dicirikan oleh; (1) sebagian besar dari penduduknya tinggal di pedesaan, dan menggantungkan hidup pada sektor pertanian, (2) sebagian besar jumlah angkatan kerja memiliki mata pencaharian dibidang pertanian, (3) pendapatan nasional sebagian besar berasal dari sektor pertanian; dan (4) sungguhpun demikian, senantiasa masih menghadapi masalah-masalah pangan, karena rendahnya tingkat efisiensi usaha-usaha pertanian (Blackenburg, 1982; Mellor dalam Moelyadi, 1982; Slamet 1987; dan Tjondronegoro, 1998).

Walaupun sebagian besar penduduknya bekerja dibidang pertanian, pembangunan pertanian terus dihadapkan dengan berbagai masalah dan tantangan yang semakin kompleks. Secara garis besar permasalahan yang dihadapi dapat dikelompokkan menjadi empat bagian, yaitu; (1) penyediaan pangan yang terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, baik jumlahnya maupun kualitasnya; (2) penyediaan bahan mentah dan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri yang terus berkembang; (3) peningkatan devisa dari sektor pertanian; dan (4) penyediaan lapangan kerja. Ciri-ciri umum yang dijelaskan itu dimiliki oleh Indonesia sebagai suatu negara agraris dan berkembang (Moelyadi, 1983; Tjondronegoro, 1998 dan Wardoyo, 1989).

Di Indonesia, pembangunan pertanian pada dasarnya merupakan suatu bagian integral dari pembangunan nasional. Dalam rangka tujuan pembangunan nasional itu, tujuan pembangunan pertanian adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, memperluas kesempatan kerja, mendorong pemerataan pendapatan, serta untuk mendukung pembangunan daerah (Kasrino, 1984; Saleh, 1983; Wardoyo, 1989; dan Satari, 1999).

Usaha untuk mewujudkan tujuan pembangunan pertanian tersebut mensyaratkan akan ketangguhan dari komponen-komponen sistem pertanian tersebut. Mosher (1987) dan Wardoyo (1989) telah mengidentifikasi komponen-komponen dari sistem pertanian yang bertindak sebagai pelaku pembangunan pertanian. Komponen *pertama*, adalah aparat pertanian. Ketangguhan komponen ini dicirikan oleh; (1) dibidang pelayanan, seperti penelitian, pendidikan penyuluhan memiliki kepekaan terhadap masalah-masalah pertanian yang selalu berkembang; (2) memiliki kemampuan berkreasi secara dinamis untuk melahirkan berbagai inovasi sosial; (3) organisasi aparat pertanian mampu mendorong daya kreativitas petugasnya sehingga terus menerus berkembang keahlian, keterampilan dan produktivitasnya.

Komponen *kedua*, petani. Ketangguhan petani ini dicirikan oleh; (1) petani memiliki keterampilan dalam menerapkan inovasi, baik inovasi teknik maupun inovasi sosial, sesuai dengan perkembangan zaman; (2) petani berkemampuan untuk meningkatkan pendapatan yang layak, yang diukur dengan tingkat kewajaran hidup yang terus berkembang; (3) petani berkemampuan menghadapi berbagai resiko; (4) petani berkemampuan untuk menarik manfaat dari asas skala ekonomi dalam arti perorangan atau dalam kerja sama antar

petani; dan (5) petani secara perseorangan dan terutama dalam kerja sama antar petani memiliki kekuatan yang mandiri dalam menghadapi pihak-pihak lain dalam dunia usaha.

Komponen *ketiga*, adalah lembaga ekonomi. Ketangguhan komponen ini dicirikan oleh; (1) kepemilikan keterampilan dalam menerapkan inovasi untuk terus menerus meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahanya; (2) kemampuan memperoleh tingkat keuntungan usaha yang layak, diukur dengan tingkat kewajaran yang terus berkembang; (3) kemampuan menghadapi berbagai resiko usaha yang ditimbulkan oleh perubahan-perubahan dalam perkembangan ekonomi baik di dalam maupun di luar negeri; dan (4) kemampuan menarik manfaat dari asas skala ekonomi yang dapat memberikan produktivitas dan efisiensi usaha yang lebih tinggi.

Komponen *keempat*, adalah lembaga sosial pedesaan. Ketangguhan lembaga ini dicirikan oleh; (1) kemampuan untuk menciptakan iklim yang sehat, sehingga para petani dapat mengembangkan usahanya secara aman; (2) kemampuan menciptakan iklim usaha bersaing kreatif dengan menegakkan asas usaha bersama dan kekeluargaan; dan (3) kemampuan menciptakan iklim yang mendukung anggota masyarakat bekerja keras, ulet dan jujur untuk mencapai tujuan.

Petani memiliki posisi kunci untuk mewujudkan pertanian yang tangguh. Petani yang tangguh adalah petani yang memiliki kemampuan dan kesempatan untuk merencanakan dan memutuskan apa yang terbaik bagi mereka, baik secara perserorangan maupun secara bersama. Untuk mencapai petani semacam itu, diperlukan keterpaduan dari semua sektor pembangunan dan semua pihak yang

terkait dengan pengembangan petani secara berkolaborasi (Slamet, 1987; Moeljadi, 1983; dan Soewardi, 1987).

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Satari (1999: 10) mengetengahkan lima orientasi strategi pembangunan pertanian yang dijadikan satu kesatuan paradigma baru yang berorientasi kepada: (1) pemberdayaan ekonomi petani khususnya, dan masyarakat pedesaan umumnya; (2) pemanfaatan ketahanan pangan; (3) pasar dalam dan luar negeri; (4) IPTEK sebagai ujung tombak peningkatan nilai tambah dan teknologi ramah lingkungan; dan (5) pendekatan industri pengelolaan yang menghasilkan produk olahan dalam bentuk yang banyak terdapat di pasar, dan tidak dengan pendekatan industri.

Dalam upaya mencapai tujuan pengembangan kemampuan petani tersebut, petani harus berubah dari bertani secara tradisional menjadi petani modern, kearah yang lebih maju. Perubahan semacam itu, dalam konteks pendidikan sering disebut sebagai perubahan perilaku, yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam bertani padi. Perubahan perilaku dimaksud dapat diusahakan dalam waktu cepat, yaitu dengan cara memaksa para petani, dan diiringi dengan sanksi negatif bila petani tidak mematuhi.

Perubahan perilaku yang terjadi melalui proses pemaksaan akan berdampak negatif bagi petani, hal tersebut dikarenakan perubahan perilaku yang terjadi pada petani tidak didasari oleh adanya kesadaran dari para petani itu sendiri. Apabila kondisi tersebut terus berlangsung, Slamet (1987), Mosher (1987), dan Moeljadi (1983) meragukan terbentuknya petani-petani yang berkemampuan, tangguh dan mau menerima inovasi sebagai unsur yang amat penting dalam sistem pembangunan pertanian. Mereka memandang perubahan

perilaku petani sangat penting dalam pembangunan pertanian, sehingga titik berat pembangunan pertanian yang sesungguhnya adalah pembangunan para petani dan usaha taninya

Korten (1984), Chambers (1987) dan Soetomo (1990) menyebutnya dengan konsep pembangunan pertanian yang berorientasi kerakyatan, bersifat humanistik atau pembangunan yang mengutamakan manusianya, sebagai sisi lain dari pembangunan yang mementingkan produksi. Dalam rumusan yang lebih terperinci mereka mengistilahkan dengan pembangunan yang mulai dari belakang atau proses belajar terbalik. Pengertian dari pendekatan ini adalah, apabila sebelumnya pembangunan pertanian dijalankan atas program-program yang disusun dari luar yang belum pasti berorientasi kepada realitas kondisi di lapangan, maka seharusnya orang luar yang lebih dahulu belajar dari kondisi kehidupan para petani.

Pertanian senantiasa berubah dan terus berkembang. Dalam perubahan dan perkembangannya itu selalu dihadapkan dengan berbagai tantangan dan serba kemungkinan. Guna menghadapi tantangan dan kemungkinan tersebut petani harus diberdayakan, dalam arti petani harus tahu dan faham atas segala yang dilakukannya dan diputuskannya, dan tidak selalu menggantungkan diri pada pihak lain. Ini berarti, petani harus didorong agar terus belajar sehingga memiliki kemampuan yang terus meningkat, memiliki sejumlah informasi yang cukup menurut kebutuhannya, serta mampu merencanakan dan memutuskan sesuatu yang terbaik untuk dirinya.

Proses perubahan petani yang mengarah kepada terciptanya petani-petani yang memiliki kemampuan untuk menerapkan inovasi, mampu menghadapi

berbagai resiko, memiliki kekuatan secara mandiri memerlukan waktu yang relatif cukup lama serta harus melalui proses belajar (*learning process*). Dalam hubungan itu, Jahi (1989), Slamet (1990) dan Mardikanto (1993) menyatakan, pada dasarnya petani tidak akan dapat berubah dengan sendirinya, petani harus mengalami proses belajar untuk memperoleh informasi dan kemudian memprosesnya menjadi pengetahuan, dan melatih dirinya agar mampu berbuat. Untuk itu diperlukan usaha-usaha khusus yang bersistem dan berstrategi yang berfungsi sebagai fasilitator bagi petani yang mengalami proses belajar. Proses belajar tersebut dapat terjadi dalam suatu wadah bagi petani, yang disebut kelompok tani.

Kelompok tani merupakan wadah dan kelas belajar bagi petani. Sebagai wadah dan kelas belajar, proses pembelajaran seyogyanya mengacu kepada proses pemberdayaan, mengingat petani sebagai warga belajar umumnya orang dewasa, sehingga memerlukan pendekatan pendidikan orang dewasa dan belajar partisipatif. Apabila prinsip ini dijalankan, menurut Soetomo (1990: 37-38) akan memberi dua keuntungan. *Pertama*, masyarakat yang mengetahui apa yang menjadi kebutuhannya, sehingga tepatlah apabila masyarakat sendiri yang menentukan pengetahuan dan keterampilan yang akan mereka kembangkan melalui kelompok tani. Dengan demikian, pelaksanaan program kelompok tani benar-benar berorientasi kepada kepentingan petani, sehingga petani merasakan keterlibatannya dalam kelompok tani sebagai kelas belajar.

Kedua, masyarakat sendiri secara nyata aktif dalam proses pembentukan kelompok tani sebagai kelas belajar, demikian pula dalam pengelolaan dan pengembangannya. Dengan demikian diharapkan bahwa mereka akan merasa


kelompok tani tersebut benar-benar menjadi miliknya, sehingga petani menjadi lebih terdorong untuk memeliharanya dan mengembangkannya, serta menjadikannya sebagai wadah untuk belajar.

B. Masalah dan Fokus Penelitian

Orang dewasa yang melibatkan diri dalam suatu aktivitas belajar, datang dengan mengikutsertakan karakteristik-karakteristik yang memiliki implikasi bagi pembelajaran dan upaya bekerja sama dengan mereka. Menurut Bock (Jahi, 1989); Sudjana (1993) dan Knowles (1970), karakteristik orang dewasa tersebut adalah; (1) memiliki banyak pengalaman hidup; (2) memiliki masa kesiapan untuk belajar; (3) memiliki banyak peranan dan tanggung jawab, sehingga berpandangan untuk segera menerapkan perolehan hasil belajarnya; (4) kadangkala orang dewasa tertentu kurang memiliki kepercayaan pada kemampuan mereka untuk belajar; dan (5) menunjukkan tingkat keragaman yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan para pemuda, sehingga memerlukan prinsip membelajarkan yang berbeda pula.

Ciri-ciri itu dimiliki oleh petani sebagai anggota kelompok tani. Fakta yang menunjukkan perbedaan antara pemuda dengan orang dewasa, berimplikasi terhadap pendekatan dalam proses pembelajarannya. Menurut Knowles (1970) dan Sudjana (1993) belajar bagi orang dewasa harus berpusat pada masalah (*problem centered*), berorientasi pada pengalaman-pengalaman yang dimiliki, berorientasi pada aktivitas dan keinginan orang dewasa sebagai petani, serta menunjukkan kegunaan pada diri orang dewasa sebagai anggota kelompok tani.

Pengalaman belajar yang diperoleh oleh orang dewasa sebagai petani melalui kelompok tani merupakan cara belajar yang mampu merangsang



tumbuhnya perilaku yang diinginkan. Karena didalam kelompok petani terjadi proses belajar juga terjadi proses produksi yang lebih bersifat ekonomis dan bahkan juga proses interaksi antar petani yang lebih bersifat sosiologis.

Kegiatan belajar di dalam kelompok tani dititik beratkan pada proses pembelajaran kelompok. Dalam proses ini tentu saja akan ada yang bertindak sebagai pemberi dan penerima. Pada umumnya pemberi akan lebih banyak berperan memberi daripada petani sebagai penerima, walaupun tidak berarti harus selamanya demikian, karena diharapkan akan terjadi juga pengembangan kreativitas dari petani sebagai anggota kelompok tani dalam mencapai hasil belajar yang diharapkan.

Dalam kelompok tani ini terjalin hubungan sosial antara beberapa individu yang memiliki latar belakang yang berbeda. Namun dari variasi tersebut terdapat satu kesamaan kepentingan yang hendak dicapai, yaitu meningkatkan kemampuan diri dalam pengembangan usaha tani. Dalam kaitan inilah interaksi sosial di dalam kelompok tani ini diharapkan akan melahirkan suatu kondisi saling tukar pengalaman, sebagai bentuk saling membelajarkan.

Dalam sepanjang sejarahnya, petani tidak pernah menjadi kaum atau kelompok yang menang dalam tawar menawar kekuatan dan posisi bila berhadapan dengan alam yang keras, struktur kekuasaan ekonomi dan politik yang menindas, serta sistem pengetahuan dan teknologi yang memihak, sehingga kesuraman selalu menyertai petani (Ban dan Hawkins, 1999: 1-2). Kesuraman itu tidak hanya sebagai akibat dari ketergantungan petani terhadap alam, yang kadangkala bersifat ramah, disisi lain tidak bersahabat pada petani, akan tetapi juga kesuraman itu muncul manakala sistem ekonomi dan politik tidak memihak

mereka. Petani, tidak jarang bahkan amat sering dijadikan objek dari segala kebijakan yang tidak adil oleh kaum kuat-penguasa untuk memanfaatkan dan menguasai petani sebagai kaum yang tidak berdaya.

Di Indonesia, selama pembangunan jangka panjang pertama (PJP I) sektor pertanian tidak mendapat posisi yang layak dalam prioritas dalam pembangunan, sehingga sektor yang merupakan mata pencaharian sebagian besar penduduk ini justru menjadi marginal. Pertanian menjadi terpinggirkan oleh kebijakan yang hanya mementingkan pertumbuhan itu, sering sekali hanya memberikan suatu keberhasilan semu atau sesaat (Kompas, 11 Oktober, 1999: 4). Selama ini pembangunan pertanian hanya berorientasi pada produksi, namun tidak responsif terhadap pasar, petani tidak ditempatkan sebagai subjek dalam merencanakan pertanian sehingga aspirasi petani sendiri tidak terakomodir secara maksimal. Pada titik inilah kemerdekaan petani untuk menentukan nasib sendiri tidak pernah akan tercapai, karena berbagai program pembangunan pertanian yang dilaksanakan itu terbukti tidak secara langsung menyentuh petani, dan sangat tidak demokratis, yang sesungguhnya telah menjadikan petani menjadi tidak berdaya (Kompas, 17 Juli, 1999; Kompas, 26 Juli, 1999; Kompas, 11 Oktober, 1999; dan Kompas 12 Oktober, 1999). Dari struktur kehidupan sosial-politik, sosial- ekonomi, sosial- budaya dan pendidikan belum mendukung petani secara optimal. Suasana sosial-psikologis yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat kurang kondusif, kurang memberi angin segar, bahkan cenderung *oppressive-exploitatif*. Petani yang kurang atau tidak berdaya, tidak mampu merespons apalagi berinteraksi dengan situasi-situasi lingkungan secara aktif. Akibat dari kesalahan paradigma pembangunan pertanian yang selama ini

diselenggarakan, dukungan sektor pertanian dalam mendukung
menjadi melemah.



Petani, kurang bahkan sama sekali hampir tidak memiliki rasa kekuatan (*sense of power*), dan ketergantungan yang tinggi pada lingkungan. Keberadaan petani seperti yang digambarkan tersebut, ditunjukkan oleh Scott (1976: 17), dalam penelitiannya di Asia Tenggara bahwa petani dalam pengambilan keputusan selalu mengutamakan prinsip *dahulukan selamat*. Prinsip ini berakibat pada munculnya nilai-nilai moral dan sosial yang kurang menguntungkan bagi masyarakat tani, seperti penolakan terhadap inovasi pertanian.

Wolf (1986: 18-19) dalam penelitiannya menyimpulkan masalah kaum tani adalah masalah mencari keseimbangan antara tuntutan-tuntutan dari dunia luar dan kebutuhan petani untuk menghidupi keluarganya. Dalam usaha untuk mengatasi permasalahan yang paling mendasar itu, petani menempuh dua strategi utama, yaitu; (1) petani harus meningkatkan hasil kerja di atas lahan pertaniannya untuk menaikkan produktivitasnya dan memperbesar jumlah hasil bumi yang dijualnya di pasar; dan (2) menekan konsumsi, dalam arti petani dapat membatasi makanan kalorinya pada jenis-jenis makanan yang paling pokok saja.

Keberadaan petani, seperti yang dipaparkan itu berlangsung secara terus menerus dan rawan terhadap tekanan-tekanan yang datang dari luar yang mengancam eksistensi petani, dan merupakan awal dari ketidak berdayaan petani. Tekanan-tekanan tersebut, menurut Wolf (1986: 35) bisa berasal dari ekotipe petani itu sendiri, ada tekanan-tekanan yang berasal dari sistem sosial kaum tani, dan tekanan-tekanan yang selalu dihadapi oleh kaum tani yang berasal dari masyarakat yang lebih luas. Tekanan bersifat ekonomis yang berwujud

keharusan membayar pajak, bunga atas pinjaman, dan lain-lain; tekanan-tekanan yang bersifat politis, seperti campur tangan penguasa terhadap otonomi petani.

Idealnya, petani itu sendiri menjadi pemain utama, menjadi subjek (*main actor*), tidak lagi sebagai objek dalam pembangunan pertanian, sehingga akan terjadi proses demokratisasi dalam pengembangan keterampilan, sikap, dan pengetahuan pertanian. Hal ini bermakna bahwa petani harus diikuti sertakan dalam merencanakan program pembangunan pertanian.

Departemen Dalam Negeri mengklasifikasi kelembagaan pertanian kedalam tiga tingkatan, yaitu; (1) kelembagaan pembinaan, (2) pelayanan, dan (3) pelaksanaan pembangunan. Kelembagaan pembinaan berada ditingkat kecamatan sebagai Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP), dengan aparatnya yang meliputi seluruh instansi yang ada ditingkat tersebut, dan dikoordinasi oleh Camat. Kelembagaan pelayanan berada ditingkat Wilayah Unit Desa (WILUD), yang terdiri dari kelembagaan Penyuluhan Pertanian, perkreditan (BRI-UD), penyalur sarana produksi pertanian, pengairan dan KUD. Tingkat terbawah (desa-desa dalam Wilud) adalah kelembagaan pelaksana pembangunan, yaitu kelompok-kelompok tani, yang semula dibina oleh Dinas Pertanian bagi kepentingan penyuluhan pertanian, yang beraneka ragam seperti, kelompok pendengar siaran pedesaan, perkumpulan petani pemakai air, wanita tani dan sebagainya.

Kelompok tani yang digunakan sebagai rantai penyuluhan pertanian, mengalami sejarah pasang surut, yang dalam masa pelita dibina kembali sejalan dengan sistem penyuluhan latihan kunjungan dan supervisi (LAKU SUSI), yang membentuk kelompok-kelompok petani dimana sawahnya sehamparan, terdiri

dari golongan petani maju dan petani tradisional, dipimpin oleh seorang kontak tani.

Kelompok tani itu ditumbuhkan dari atas, terutama dibentuk oleh PPL, tetapi tidak mustahil tumbuh dari bawah. Apapun kejadiannya, kelompok tani ini bukan hanya berfungsi dalam meningkatkan produksi dan produktivitas usahatani semata-mata, akan tetapi juga dalam integrasi seluruh petani di desa. Seperti yang diketengahkan oleh Wiriatmadja (Rusidi, 1989: 112), kelompok tani juga berfungsi sebagai media komunikasi dan pergaulan sosial yang wajar, lestari dan dinamis, sebagai basis untuk mencapai pembaharuan yang merata, sebagai wadah yang efektif dan efisien untuk belajar dan bekerja sama dalam usahatani, sebagai wadah pemersatu aspirasi yang murni dan sehat dan sebagai teladan bagi masyarakat pedesaan.

Masih berkaitan dengan kelompok tani, disertasi Hussein (Rusidi, 1989: 92), menemukan bahwa tidak semua petani di Jawa Barat menjadi anggota kelompok tani. Ia mengemukakan bahwa keberadaan itu ditentukan oleh sebab kontak tani, petani maju, dan petani pengikut memiliki perbedaan persepsi dalam hal ukuran keanggotaan kelompok itu. Tidak semua kontak tani (57,5%), dan petani maju (40,8%) menyadari bahwa mereka mempunyai tanggung jawab untuk membantu membimbing dan memberi informasi, masing-masing kepada empat orang petani pengikut. Hanya 8,5% dari group leaders (kontak tani dan petani maju) yang dapat menyebutkan nama-nama empat orang petani yang menjadi pengikutnya, dan untuk siapa mereka bertanggung jawab.

Apabila kelompok tani dianggap sebagai suatu jenis kelembagaan pelaksana pembangunan, terutama dalam bidang pertanian, maka di dalamnya

harus ada partisipasi yang kompak. Berkaitan dengan hal itu, Husein (Rusidi, 1989: 92) menemukan suatu partisipasi dari petani (kontak tani, petani maju, dan petani pengikut) dalam kelompok tani dalam hubungannya dengan intensifikasi usaha tani (Bimas dan Insus) yang disertai dengan berbagai alasannya, seperti ditunjukkan pada tabel 1.1.

Dari temuan Hussein tersebut, ternyata sebesar 29,00% responden beralasan utama pada ketidak mengertian mereka terhadap program Bimas dan Insus, ketidak tertarikan terhadap program-program kelompok tani yang ditawarkan sebesar 17,90%, sementara sebesar 15,40% lainnya beralasan kesukaran untuk mengembalikan kredit bila dilakukan peminjaman, dan berkaitan dengan ketidak mampuan petani untuk memenuhi sarana produksi untuk bertani dijadikan alasan dari 14,80% petani, serta alasan-alasan program yang ditawarkan tidak berada diwilayah petani berada sebesar 13,60%.

Tabel 1.1
Alasan Petani untuk Tidak Berpartisipasi
terhadap Program Kelompok Tani

No	Alasan-alasan	Persentase
(1)	(2)	(3)
1	Program tidak dimengerti oleh petani	29,00
2	Program tidak menarik	17,90
3	Kesukaran pengembalian pinjaman	15,40
4	Tidak mampu memenuhi sarana produksi	14,80
5	Program tidak berada diwilayah petani	13,60
6	Kesulitan mendapatkan kredit	3,70
7	Tidak ingin mempunyai hutang	3,70
8	Program sukar untuk dikerjakan	1,20
9	Untuk mengurangi biaya	0,20

Husein (Rusidi, 1989: 92)

Faktor-faktor tersebut merupakan lima alasan utama yang mendasari petani untuk tidak berpartisipasi terhadap program-program kelompok tani dalam bidang Bimas dan Insus. Alasan-alasan lain cukup kecil persentasenya, seperti kesulitan untuk mendapatkan kredit, tidak berkeinginan memiliki hutang, program-program tidak dapat untuk dikerjakan, dan alasan untuk pengurangan biaya, yang keseluruhannya berjumlah 8,80%.

Dari gambaran kelompok tani tersebut, menunjukkan bahwa keadaan kelompok tani untuk dapat menjalankan fungsinya secara maksimal masih belum dapat dicapai. Ketidak mampuan kelompok untuk menjalankan fungsinya tersebut adalah sebagai akibat dari rendahnya keterlibatan anggota kelompok tani dalam proses penyusunan program kegiatan kelompok. Hal ini berakibat kepada minimnya pemahaman anggota kelompok tani terhadap program-program kegiatan kelompok.

Berkaitan dengan kemampuan kelompok, Adjid (1985: 294) dalam penelitiannya menyimpulkan kemampuan kelompok tani padi sehamparan sebagai berikut;

- (1) Efektivitas tingkat kemampuan kerjasama kelompok tani dalam mewujudkan keserempakan dan keseragaman pengelolaan usahatani berkelompok, dipengaruhi oleh penampilan wibawa dan integritas kepemimpinan kelompok tani;
- (2) Pada tahap manajemen yang berorientasi kepada perwujudan kesempatan dan keseragaman menerapkan budaya pengelolaan usahatani berkelompok sehamparan seperti yang dihadapi saat ini, ternyata peranan perangkat lunak jauh lebih menentukan tingkat kemampuan kelompok dibandingkan dengan kelengkapan perangkat keras serta komposisi keanggotaan dari kelompok;
- (3) Kegairahan kelompok inti berpartisipasi dalam proses pengelolaan usahatani berkelompok sehamparan mendapat dukungan dari lingkungan sosial yang kondusif, berkat adanya dukungan dan pengakuan dari tokoh-tokoh unsur kelembagaan terkait, baik di dalam maupun di luar kelompok tani;

- (4) Respons partisipatif para anggota kelompok terhadap prakarsa, informasi, ajakan, pengarahan dan kewibawaan kepemimpinan kelompok inti, dalam rangka upaya terlaksananya program kelompok dipengaruhi oleh persepsi pertimbangan penilaian para anggota kelompok tani terhadap pemenuhan kebutuhan pokok hidup (terutama makan) yang dinikmati dari hasil interaksinya dengan kelompok tani inti sesama anggota.

Pembangunan pertanian pada masyarakat desa dilengkapi dengan kelembagaan-kelembagaan, yang direkayasa dan dirancang bangun menjadi kelembagaan yang bersifat pelayanan dan kelembagaan yang bersifat pelaksanaan pembangunan pada suatu wilayah kerja pembangunan. Dua kelembagaan yang semestinya bersambung itu, yaitu kelembagaan pelayanan dan kelembagaan pelaksanaan pembangunan itu ternyata berbeda kebudayaannya (Rusidi, 1989: 99). Kelembagaan pelayanan pembangunan tidak lain adalah kelembagaan pemerintahan ditingkat atas desa yang bersifat formal atau birokratis, sementara kelembagaan pelaksana pembangunan tidak lain adalah kelompok-kelompok tani ditingkat pedesaan yang bersifat informal.

Unsur-unsur yang sangat vital dalam pembangunan pertanian, terutama yang menyangkut pertanian rakyat adalah petani dan usahataniannya. Walaupun hanya mencakup dua unsur pokok itu, namun dalam pelaksanaannya akan berkaitan dengan banyak permasalahan yang menyangkut dengan berbagai bidang kehidupan. Secara umum, masalah-masalah yang berkaitan dengan petani adalah bagaimana merubah perilaku petani, dalam pengertian peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam bertani yang lebih maju sesuai dengan tuntutan perubahan.

Petani, pada umumnya berdiam di daerah pedesaan, mereka umumnya adalah sebagai kepala keluarga, yang dalam kegiatan sehari-harinya juga

berfungsi sebagai manajer usahatani dan jurutani dalam mengelola pertaniannya. Selain daripada itu, mereka juga menjadi anggota sistem sosial setempat. Ciri lain dan sangat spesifik dari petani tersebut adalah mereka tergolong kedalam orang dewasa.

Petani dapat digolongkan kedalam kelompok yang kurang beruntung. Kurang beruntung dalam aspek psikologis (*psychologically disadvantaged*), sosial (*socially disadvantaged*), ekonomi (*economically disadvantaged*) dan pendidikan (*educationally disadvantaged*) (Brookfields, 1984; Havighurst, 1972; Rogers, 1979; Cross, 1984; Chambers, 1988, dan Freire, 1972; 1973).

Chambers (1988: 141-143) mengemukakan ciri-ciri dari kelompok yang kurang beruntung sebagai berikut: *Pertama*, rumah tangga yang miskin yang merupakan faktor paling menentukan. Rumah tangga mereka umumnya tergantung kepada orang lain (majikan). *Kedua*, isolasi yang ditandai mereka tidak berpendidikan, tempat tinggal yang jauh terpencil atau diluar jangkauan komunikasi atau mereka tersisih dari arus kehidupan. *Ketiga*, kerentanan yang ditandai oleh minimnya mereka memiliki penyangga untuk menghadapi kebutuhan yang mendadak. *Keempat*, ketidakberdayaan yang ditandai mereka buta hukum, jauh dari bantuan hukum, padahal harus bersaing untuk memperoleh pekerjaan dan berbagai pelayanan dari pihak penguasa, sehingga mereka menjadi sasaran empuk bagi mereka yang lebih kuat. Kedudukan sosialnya berada pada tingkat bawah, dan selalu berada dibawah pengaruh dan pemerasan rentenir. Ketidak berdayaan ini mendorong proses pemiskinan dalam berbagai bentuk, terutama pemerasan oleh kaum yang lebih kuat. Orang yang tidak berdaya, seringkali memiliki keterbatasan atau tidak memiliki akses terhadap

perkembangan sosial-politik, ekonomi, pendidikan maupun sektor-sektor yang lain.

Selama ini, petani hanya dipandang sebagai alat produksi pangan belaka, dan tidak diberi peluang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, tidak memiliki kebebasan untuk mengorganisasikan diri, sehingga dapat merugikan dalam mengembangkan kemampuan baik individu maupun kelompok. Akibat dari 'dipaksa', 'terpaksa', dan menjadi 'biasa', akan menimbulkan efek samping (*side effect*) yang sangat mengerikan, dimana petani menjadi biasa dipaksa. Dalam keadaan seperti ini, petani tidak lagi memiliki inisiatif, tidak lagi kreatif dan hilang jiwa kemandiriannya, berganti dengan jiwa ketergantungan, yang selanjutnya masyarakat petani mengalami pengurasan semangat kemampuan (*spirit depletion*) (Soewardi, 1987: 7)

Dari sisi lain, pertanian penuh dengan tantangan dan serba kemungkinan, dan untuk dapat menghadapi situasi yang serba kemungkinan itu, petani tidak cukup hanya bisa mengerjakan tanpa mengerti apa dan mengapa itu semua harus dilakukan (Slamet, 1987: 5). Petani seyogyanya memiliki kepercayaan diri, dan tidak selalu bergantung pada kemampuan orang lain. Hal ini berarti bahwa petani harus diberdayakan agar mereka memiliki kemampuan yang terus meningkat, memiliki akses menguasai perbendaharaan informasi yang cukup, mampu merencanakan, dan memutuskan sesuatu yang terbaik untuk dirinya, bagi kelompok dan keluarganya.

Keberdayaan kelompok tani yang hendak diwujudkan itu memerlukan waktu yang relatif panjang dan melalui suatu proses, yang disebut dengan belajar. Bagi petani, belajar tersebut terjadi dalam wadah yang disebut dengan kelompok

tani. Dalam kaitannya dengan hal itu, Sudjana (1993: 117) menyatakan bahwa, dalam kegiatan belajar membelajarkan selayaknya menggunakan pendekatan pembelajaran partisipatif, atau memberi kesempatan kepada warga belajar untuk melibatkan diri, karena kegiatan belajar partisipatif (*participatory learning*) pada dasarnya bersumber dari kebiasaan-kebiasaan yang positif di masyarakat yang telah memberi dorongan keterlibatan warganya untuk memecahkan masalah secara bersama. Kegiatan pembelajaran partisipatif tersebut diselenggarakan dengan berorientasi kepada; (1) kebutuhan belajar (2) pada tujuan kegiatan belajar, (3) berpusat pada peserta didik, dan (4) pengalaman belajar.

Suryadi (1989: 95) berpendapat, ada lima prinsip-prinsip yang dapat dipergunakan dalam penyelenggaraan pembelajaran partisipatif. *Pertama*, prinsip keterpaduan. Prinsip ini bermakna bahwa dalam pengelolaan program pembelajaran penyusunannya dilakukan oleh, bersama, dalam, dan untuk anggota kelompok yang didasarkan pada kebutuhan guna memenuhi kepentingan bersama. *Kedua*, prinsip keberlanjutan. Prinsip ini bermakna dalam pengelolaan program kegiatan kelompok mengandung pengertian sebagai pemberi arah kepada pengembangan kelompok tani yang tidak dilakukan sekaligus, melainkan dilakukan secara bertahap dan terus menerus menuju kearah pengembangan kelompok tani menjadi lebih berdaya. *Ketiga*, prinsip keserasian atau kesesuaian. Prinsip ini menunjukkan bahwa pengelolaan program kegiatan kelompok dilakukan dengan memperhatikan keserasian antara kebutuhan yang terasa yang dinyatakan oleh anggota kelompok dan kelompok tani, sehingga program kegiatan kelompok terlihat adanya keserasian antara kepentingan individu sebagai anggota kelompok dan kepentingan kelompok tani. *Keempat*, prinsip

kemampuan sendiri. Dalam prinsip ini, pengelolaan program kelompok disusun dan dilaksanakan atas dasar kemampuan yang dimiliki oleh kelompok tani. Sementara keterlibatan pihak lain diluar kelompok hanya sebatas memberi motivasi, serta bantuan sehingga kelompok dapat mendayagunakan sumberdaya yang tersedia secara efektif dan efisien. *Kelima*, prinsip kaderisasi. Prinsip ini mengisyaratkan bahwa pengelolaan program kegiatan kelompok hanya akan dapat berlangsung dengan baik apabila pada kelompok telah disiapkan kader-kader kelompok yang memiliki sikap, pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan kelompok sesuai dengan tujuan kelompok.

Berdasar pada pemaparan tersebut, dan dengan mengacu kepada prinsip-prinsip serta langkah-langkah, strategi pendekatan dalam pembelajaran, dan sumber belajar dalam pembelajaran partisipatif dalam keterkaitannya dengan pemberdayaan kelompok, permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada: *Model pembelajaran partisipatif dalam keterkaitannya dengan upaya memberdayakan kelompok tani petani padi sawah di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.*


Untuk mengarahkan pengumpulan data, maka permasalahan tersebut akan dijabarkan kedalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan implementasi prinsip-prinsip, langkah-langkah, strategi pendekatan pembelajaran partisipatif, bantuan sumber belajar dan pemberdayaan kelompok oleh kelompok kontrol dan eksperimen sebelum dan setelah eksperimen (implementasi) model dilaksanakan ?

2. Bagaimana efektivitas model pembelajaran partisipatif dapat memberdayakan kelompok tani petani padi di Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara ?

C. Definisi Operasional

1. Model Pembelajaran Partisipatif merupakan suatu disain pembelajaran yang ditujukan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Pembelajaran partisipatif dikemukakan oleh Sudjana (1993: 5) sebagai upaya sumber belajar untuk mengikutsertakan warga belajar dalam kegiatan pembelajaran.
2. Dalam penelitian ini, sumber belajar yang dimaksud adalah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), yang ditelusuri melalui upayanya dalam memberikan bantuan untuk mengikutsertakan anggota kelompok tani petani padi sawah dalam pengelolaan kegiatan kelompok belajar, dan bagaimana anggota kelompok memanfaatkannya sehingga kelompok menjadi lebih berdaya.
3. Pengelolaan program pembelajaran kelompok dilaksanakan dengan berdasarkan kepada prinsip-prinsip pembelajaran partisipatif. Prinsip-prinsip pembelajaran partisipatif yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup prinsip; (1) kebutuhan belajar kelompok (*learning needs based*), (2) berorientasi pada tujuan kegiatan belajar (*learning goals and objectives oriented*), (3) berpusat pada warga belajar (*participant centered*), dan (4) belajar berdasarkan pengalaman anggota kelompok (*experiential learning*).

- 
4. Langkah-langkah pembelajaran partisipatif yang dimaksud dalam penelitian ini didasarkan pada langkah pembelajaran pendidikan orang dewasa, sebagai berikut; (1) pembinaan keakraban, (2) identifikasi kebutuhan, sumber dan kemungkinan hambatan, (3) perumusan tujuan belajar, (4) penyusunan program kegiatan belajar, (5) pelaksanaan kegiatan belajar, dan (6) penilaian proses, hasil, dan pengaruh kegiatan belajar (Sudjana, 1993; Jahi, 1998; dan Mardikanto, 1993).
5. Strategi pendekatan pembelajaran partisipatif, yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah siasat dalam pembelajaran yang dilakukan oleh kelompok tani yang mencakup; (1) pendekatan yang berpusat pada pemecahan masalah, yang terdiri dari mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anggota kelompok tani yang mendesak untuk dipecahkan, merumuskan alternatif pemecahan masalah yang telah dirumuskan, menyusun rencana pemecahan masalah, dan melaksanakan pemecahan masalah, dan (2) pendekatan perwujudan diri, yang diartikan dengan proses yang berpusat pada peserta didik, pembelajaran berlangsung melalui peer learning, dan kebebasan (keotonoman) dari anggota kelompok untuk beraktifitas dalam mengelola kelompok.
6. Kelompok tani, dalam penelitian ini adalah sebagai kumpulan orang-orang tani atau petani yang berada dalam suatu wilayah, terikat atas dasar kebutuhan bersama yang dipimpin oleh seorang ketua kelompok, yaitu kontak tani. Petani yang dimaksud dalam penelitian ini adalah petani padi sawah, sehingga kelompok tani dalam penelitian ini adalah kelompok tani petani padi sawah.

7. Orang dewasa (*adult*) dalam penelitian ini diartikan sebagai petani padi sawah yang melibatkan diri dalam suatu kegiatan belajar melalui wadah kelompok tani, dengan ciri-ciri; (1) telah memiliki konsep diri, (2) memiliki akumulasi pengalaman, (3) memiliki masa kesiapan untuk belajar, (4) memiliki keinginan untuk segera menerapkan perolehan hasil belajarnya, dan (5) mereka dapat belajar.
8. Pemberdayaan kelompok tani, adalah setiap usaha kelompok untuk membangkitkan kesadaran, pengertian dan kepekaan anggota kelompok tani petani padi sawah terhadap faktor-faktor atau unsur-unsur dinamika kelompok tani yang dapat diberdayakan, guna menghidupkan, menggerakkan, atau mengaktifkan kelompok tani dalam mencapai tujuan-tujuan kelompok. Keberdayaan kelompok tani dimaksud ditelusuri melalui faktor-faktor dinamika kelompok tani petani padi sawah yang menentukan dinamis, atau berdaya tidaknya kelompok tani, yang terdiri dari; (a) tujuan kelompok, yang diartikan keinginan-keinginan yang diupayakan untuk dicapai oleh kelompok; tujuan ini merupakan tujuan bersama dari setiap warga kelompok yang dirumuskan secara jelas, sehingga setiap anggota kelompok mengetahui arah kelompok dan berperilaku sesuai dengan tujuan kelompok; (b) norma kelompok, diartikan sebagai standar yang dijadikan alat untuk menilai perilaku anggota kelompok, dan dari jumlah norma yang diciptakan untuk mengatur kehidupan kelompok; (c) tekanan kelompok, adalah tekanan bersifat mental terhadap kehidupan kelompok yang amat penting terhadap pencapaian tujuan kelompok dan bagi anggota kelompok. Tekanan-

tekanan tersebut boleh berasal dari luar kelompok maupun yang datang dari dalam kelompok; (d) iklim kelompok, adalah suasana kelompok yang berkaitan dengan sikap anggota kelompok, terhadap tujuan kelompok dan terhadap sesama anggota kelompok. Iklim kelompok tersebut ditandai oleh keakraban, tenggang rasa, rasa senang, bersemangat, atau apatis; (e) struktur kelompok, adalah suatu pola yang teratur tentang bentuk tata-tata hubungan antara individu-individu dalam kelompok, yang sekaligus menggambarkan kedudukan dan peran masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan kelompok (Mardikanto, 1993: 200); (f) pengembangan dan pembinaan kelompok, adalah kegiatan usaha untuk mengembangkan dan membina yang berorientasikan kepada kehidupan kelompok. Usaha tersebut dilakukan dengan cara mengusahakan pelibatan anggota kelompok dalam setiap kegiatan, menyediakan fasilitas yang diperlukan, menjaga kelancaran komunikasi, dan selalu melakukan koordinasi; (g) efektivitas kelompok, adalah keefektifan kelompok dalam mencapai tujuan kelompok. Keefektifan ini dilihat berdasar kepuasan dan meningkatkan posisi dan peran anggota kelompok setelah tujuan kelompok tercapai. Semakin sempurna tujuan kelompok dapat dicapai, akan semakin puas warga kelompok. Keefektifan ini juga dapat ditelusuri melalui variasi metoda yang digunakan untuk mencapai tujuan akan semakin efektif kelompok, juga kelompok semakin dinamis; (h) keutuhan/kesatuan kelompok, adalah kekompakan anggota kelompok yang ditentukan dengan besarnya

komitmen dari seluruh anggota kelompok dalam keterkaitannya dengan tujuan, norma dan nilai yang dianut kelompok.

9. Pengembangan program pembelajaran kelompok, yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu kepada pendapat yang dikemukakan oleh Kesley dan Pesson (Jahi, 1989: 43), yaitu sebagai aktivitas kooperatif yang berkesinambungan, yang melibatkan anggota kelompok sebagai warga belajar dan penyuluh pertanian, serta kontak tani untuk mengidentifikasi masalah-masalah, tujuan-tujuan, dan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
10. Efektivitas model pembelajaran partisipatif, adalah keberhasilan model pembelajaran dalam pemberdayaan kelompok tani dalam arti out come (pengaruh), yang dilihat dari; (a) meningkatnya jumlah anggota kelompok tani dalam mengimplementasikan unsur-unsur dinamika dalam pengelolaan kelompok; (b) jumlah anggota kelompok menjadi anggota koperasi meningkat; dan (c) saling membelajarkan sesama anggota menjadi lebih baik.

D. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu model pembelajaran partisipatif dalam pemberdayaan kelompok tani. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan sejumlah informasi relevan, mempelajari, dan mendeskripsikan tentang:

1. Implementasi prinsip-prinsip, langkah-langkah, dan strategi pendekatan pembelajaran partisipatif dan pemberdayaan kelompok tani sebelum dan

setelah eksperimen (implementasi) model pada kelompok tani petani padi sawah di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

2. Pemanfaatan bantuan sumber belajar dalam pembelajaran partisipatif oleh kelompok tani dalam memberdayakan kelompoknya.
3. Efektivitas model pembelajaran partisipatif dalam pemberdayaan kelompok tani petani padi sawah di Kabupaten Deli serdang Provinsi Sumatera Utara.

E. Manfaat Penelitian

Temuan-temuan dari penelitian diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara praktis, maupun dalam pengembangan konsep teoretik, yang berkaitan dengan pembelajaran partisipatif dalam keterkaitannya dengan usaha memberdayakan kelompok tani.

Secara praktis, temuan penelitian ini dapat memberi masukan yang cukup akurat bagi lembaga penyelenggara pendidikan orang dewasa (swasta maupun pemerintah) dalam menyusun kebijakan, merencanakan, mengelola, dan menyelenggarakan berbagai program pembelajaran khususnya yang dilaksanakan melalui jalur pendidikan luar sekolah, termasuk salah satu diantaranya upaya pemberdayaan kelompok tani. Dengan upaya pemberdayaan kelompok tani yang akurat, diharapkan akan berdampak langsung terhadap penanggulangan akan ketidak berdayaan petani.

Untuk keperluan teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan pengetahuan dalam mendukung pengembangan Pendidikan Luar Sekolah, terutama dalam bidang andragogi, pembelajaran partisipatif (*participatory learning*), pemberdayaan (*empowerment*), dan dinamika kelompok (*group dynamics*).

F. Asumsi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan atas dasar asumsi-asumsi sebagai berikut;

1. Petani yang tergabung di dalam kelompok tani memiliki kemampuan untuk berperilaku modern. Mereka mampu merubah dirinya dari keadaan yang tidak bisa melihat jauh kedepan, jera terhadap usaha-usaha yang menghendaki pengambilan resiko, statis, apatis, fatalistik, menjadi keadaan yang terbuka, menerima inovasi, berani mengambil resiko, dinamis, dan aktif memperbaiki nasib (Trisnamansyah, 1984: 655).
2. Perubahan perilaku dapat terjadi pada kelompok tani, karena kelompok tani merupakan suatu subjek yang mampu berperilaku secara rasional (Littrell, 1986: 12).
3. Pengelolaan program pembelajaran dalam kelompok tani yang efektif berkaitan dengan pengelolaan pembelajaran petani sebagai orang dewasa. Pengelolaan program pembelajaran pada kelompok tani tersebut akan lebih efektif jika berorientasi kepada kebutuhan, masalah, aspirasi petani, dan sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan, yang dalam pengelolaannya petani diikuti sertakan (Trisnamansyah, 1984: 655).
4. Bentuk dan jenis sasaran belajar yang berbeda memerlukan strategi yang berbeda untuk mengoptimalkan pencapaian kemampuan yang ditetapkan dalam sasaran belajar tersebut (Gagne, 1977; dan Romiszowski, 1980).
5. Belajar adalah suatu proses perubahan perilaku pada diri orang yang belajar melalui interaksi dengan lingkungan, dan belajar yang efektif ditandai oleh keaktifan dari orang yang belajar.

6. Kelompok tani merupakan satuan pendidikan dalam sistem Pendidikan Luar Sekolah yang bersifat indigenous, timbul sebagai kesepakatan bersama diantara anggota kelompok tani untuk saling membelajarkan berdasarkan pengalaman mereka sehari-hari.

